

Fenomena Victim Blaming terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: *Literature Review*

Syarifah Fadia^{1*}, Desy Safitri², Sujarwo³

^{1,2,3}Universitas Negeri Jakarta, Indonesia, Jl. R.Mangun Muka Raya, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220
syarifadia05@gmail.com

Abstract

Victim blaming remains one of the negative responses frequently experienced by victims of sexual violence in Indonesia. This practice exacerbates victims' suffering and hinders their recovery process as well as their pursuit of justice. This study aims to review and synthesize the existing literature on the phenomenon of victim blaming against victims of sexual violence in Indonesia. The method employed was a literature review of 15 scholarly articles retrieved from Google Scholar and selected based on relevance criteria. The findings indicate that victim blaming commonly manifests in the belief that victims contribute to the occurrence of sexual violence or fail to prevent it. This practice is influenced by patriarchal culture, gender stereotypes, and myths surrounding sexual violence (rape myths). Victim blaming has adverse psychological impacts on victims, discourages reporting, and contributes to secondary victimization within both the criminal justice system and digital spaces. Therefore, greater public awareness and a more victim-centered approach to handling sexual violence cases are needed to reduce the prevalence of victim blaming.

Keywords: Victim Blaming, Sexual Violence, Rape Myth, Secondary Victimization.

Abstrak

Victim blaming merupakan salah satu respons negatif yang masih diterima korban kekerasan seksual di Indonesia. Praktik ini memperburuk kondisi korban dan menghambat proses pemulihan dan pencarian keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mensintesis literatur mengenai fenomena victim blaming terhadap korban kasus kekerasan seksual di Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review terhadap 15 artikel ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar dan dipilih berdasarkan kriteria relevansi. Hasil kajian menunjukkan bahwa victim blaming umumnya muncul dalam bentuk anggapan bahwa korban turut andil sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual atau gagal dalam mencegah terjadinya kekerasan tersebut. Praktik ini dipengaruhi oleh budaya patriarki, stereotip gender, dan mitos mengenai kekerasan seksual (*rape myth*). Victim blaming berdampak pada psikologis korban, menghambat pelaporan, serta memunculkan viktimisasi sekunder dalam sistem peradilan maupun ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan pendekatan yang lebih melihat sudut pandang korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Kata Kunci: Victim Blaming, Kekerasan Seksual, Rape Myth, Viktimisasi Sekunder.

Copyright (c) 2026 Syarifah Fadia, Desy Safitri, Sujarwo

✉Corresponding author: Syarifah Fadia

Email Address: syarifadia05@gmail.com (Jl. R.Mangun Muka Raya, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi permasalahan sosial yang marak dan mendapat perhatian masyarakat. Data Catatan Tahunan 2025 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diluncurkan pada 6 maret 2026 menunjukkan dari 60.267 laporan kasus yang diterima, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi ialah kekerasan seksual dengan 22.848 kasus. Angka tersebut merupakan laporan kumulatif dari sebanyak 97 lembaga (Komnas Perempuan, 2026). Tingginya angka kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Fenomena kekerasan seksual tidak hanya terjadi di masyarakat umum, tetapi juga ditemukan di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik. Sopyandi

dan Sujarwo (2023) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual juga terjadi di berbagai lembaga pendidikan, termasuk pesantren, dengan pelaku berasal dari lingkungan yang memiliki relasi dekat dengan korban. Temuan ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual perlu mendapat perhatian lebih serius. Isu kekerasan seksual di Indonesia diakui negara melalui kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur secara spesifik sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual.

Meskipun perlindungan hukum terhadap korban telah diatur, korban kekerasan masih kerap mendapat respons negatif dari lingkungan sosial. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikologis akibat tindakan pelaku, tetapi juga sering mendapatkan perlakuan berupa *victim blaming* atas kekerasan yang dialaminya. *Victim blaming* merupakan praktik atau sikap yang menyalahkan korban atas tindakan kejahatan yang dialaminya, daripada menempatkan pelaku sebagai penyebab sebenarnya dari kejadian tersebut atau sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dalam kasus kekerasan seksual, praktik ini sering muncul dalam berbagai bentuk seperti menyalahkan cara berpakaian korban dengan anggapan bahwa korban memprovokasi pelecehan seksual karena cara berpakaian, mempertanyakan tindakan korban seperti menilai korban tidak cukup melawan ataupun menolak, menyalahkan korban karena berada di lokasi tertentu, berpergian larut malam, ataupun berinteraksi dengan pelaku.

Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas terjadinya tindak kekerasan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai posisi korban dan dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual. Fenomena *victim blaming* tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar pada konstruksi sosial dan budaya yang membentuk cara masyarakat memandang korban kekerasan seksual. Normalisasi kekerasan seksual, stereotip gender, serta internalisasi mitos-mitos seputar kekerasan seksual, diduga turut membentuk sikap *victim blaming* dalam masyarakat. Di Indonesia, faktor-faktor tersebut bersinggungan atau berinteraksi dengan dinamika budaya lokal dan penyebaran narasi media yang kerap memperparah stigmatisasi terhadap korban.

Meskipun diskusi mengenai *victim blaming* semakin berkembang, kajian akademik yang secara sistematis mensintesis literatur tentang fenomena ini dalam konteks kekerasan seksual di Indonesia masih terbatas. Penelitian yang ada umumnya membahas *victim blaming* dari perspektif tertentu secara terpisah dan belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap korban. Oleh karena itu, tinjauan literatur diperlukan untuk memetakan perkembangan kajian mengenai *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk meninjau dan mensintesis literatur akademik mengenai fenomena *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi viktimologi dan gender di Indonesia, sekaligus menjadi bahan rujukan bagi praktisi, pemangku kebijakan, dan pendidik dalam upaya penanganan dan pendampingan korban kekerasan seksual.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *literature review* atau tinjauan pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan fenomena victim blaming terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai bentuk, faktor penyebab, serta dampak victim blaming berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan topik penelitian. Literatur diperoleh melalui basis data akademik Google Scholar menggunakan kata kunci "victim blaming", "kekerasan seksual", "victim blaming di Indonesia", dan "kekerasan seksual di Indonesia". Literatur yang digunakan merupakan publikasi berbahasa Indonesia dan Inggris dengan rentang tahun 2021-2026 agar sesuai dengan perkembangan fenomena dan kajian terkini.

Berdasarkan hasil seleksi literatur, diperoleh 15 artikel yang saat dianalisis menunjukkan keragaman pendekatan penelitian. Mayoritas artikel menggunakan metode hukum normatif dan kualitatif untuk mengkaji fenomena victim blaming terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, beberapa penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi dan *literature review* untuk memahami pengalaman korban serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya victim blaming. Keragaman metode ini memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai fenomena victim blaming dari aspek sosial, psikologis, maupun hukum.

Penentuan sumber data dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih literatur secara sengaja berdasarkan kesesuaian tema, relevansi pembahasan, kebaruan publik, dan keterkaitan dengan tujuan penelitian. Literatur yang tidak relevan, bersifat duplikasi, atau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena victim blaming terhadap korban kekerasan seksual tidak digunakan dalam kajian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengorganisasi berbagai literatur yang telah dipilih. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap mulai dari pencarian kata kunci, seleksi judul dan abstrak, pembacaan isi penuh artikel, hingga pengelompokan artikel berdasarkan fokus pembahasan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* atau analisis isi dengan langkah-langkah mengidentifikasi tema utama dari setiap penelitian, mengelompokkan temuan berdasarkan bentuk, faktor penyebab, dan dampak victim blaming, membandingkan hasil antarpenelitian, serta menyusun sintesis untuk memperoleh gambaran umum mengenai fenomena victim blaming terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Bentuk-Bentuk Victim Blaming

Korban sebagai Pemicu Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis dari berbagai literatur dalam enam tahun terakhir, ditemukan salah satu bentuk victim blaming yang paling sering ditemukan adalah anggapan bahwa korban merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memicu terjadinya kekerasan seksual. Bentuk victim blaming ini timbul melalui berbagai penilaian terhadap korban seperti cara korban berpakaian, perilaku korban sehari-hari, cara bergaul, kebiasaan korban untuk keluar pada malam hari, hingga keberadaan korban di tempat tertentu (Afredo et al., 2023; Dewi et al., 2026; Shopiani et al., 2021; Valia & Nuqul, 2025; Wahyuni et al., 2022). Dengan adanya penilaian ini, fokus masyarakat tidak lagi tertuju pada perilaku dan tindakan pelaku yang melakukan kekerasan, melainkan beralih pada berbagai aspek yang melekat pada diri korban. Karena alasan ini, korban dipandang memiliki kontribusi dalam terjadinya kekerasan seksual yang dialaminya.

Pakaian dan penampilan korban kerap kali menjadi alasan utama yang digunakan untuk menjelaskan terjadinya kekerasan seksual. Korban yang berpenampilan tidak sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku seperti mengenakan pakaian terbuka, memiliki tattoo, berdandan, dan mengecat rambut akan cenderung lebih mudah disalahkan daripada korban yang berpakaian rapi dan tertutup (Afredo et al., 2023; Dewi et al., 2026; Valia & Nuqul, 2025). Pandangan ini berdasar pada asumsi bahwa cara berpakaian tertentu dapat memancing perhatian atau mengundang hasrat seksual pelaku. Dalam berbagai kasus, masyarakat justru lebih banyak memperdebatkan pakaian yang digunakan korban saat terjadi kekerasan daripada mempertanyakan tindakan pelaku yang melakukan kekerasan dan jelas salah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tubuh dan penampilan korban masih sering dijadikan objek penilaian moral ketika terjadi kasus kekerasan seksual.

Selain pakaian, perilaku dan gaya hidup korban juga sering dijadikan alasan untuk menyalahkan korban. Beberapa penelitian menemukan adanya kecenderungan masyarakat untuk mengaitkan perilaku-perilaku tertentu yang dimiliki korban seperti terlalu ramah, terlalu terbuka, atau terlalu dekat dengan lawan jenis, sering bergonta-ganti pasangan dengan kekerasan seksual yang terjadi. (Shopiani et al., 2021; Valia & Nuqul, 2025; Wahyuni et al., 2022). Korban yang terlihat aktif berinteraksi di media sosial, memiliki banyak rekan laki-laki, atau sedang menjalin hubungan akrab dengan pelaku sering kali dipersepsikan sebagai pihak yang turut berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, gaya hidup seperti merokok dan meminum alkohol juga dianggap sebagai pemicu eksploitasi. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih sering menghubungkan kekerasan seksual dengan perilaku korban daripada menempatkannya sebagai akibat dari tindakan pelaku.

Bentuk victim blaming lainnya terlihat melalui bagaimana korban bergaul dan beraktivitas. Korban yang lebih sering bermain hingga malam hari, berpergian seorang diri, menghadiri acara tertentu, atau berada di lokasi yang dianggap lebih berisiko, rentan menerima tuduhan bahwa dirinya tidak cukup berhati-hati (Afredo et al., 2023; Putri, 2025; Valia & Nuqul, 2025) Dalam situasi demikian,

masyarakat cenderung mempertanyakan alasan korban berada di tempat tersebut dibandingkan mempertanyakan mengapa pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual. Pada penelitian Dewi et al. (2026) perempuan yang bekerja *shift* malam pada industri kehidupan malam seperti bar, kafe, diskotek, klub malam, tempat karaoke, festival malam, konser, dan tempat lainnya sering dinilai buruk atau nakal. Pola pikir semacam ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk membebaskan tanggung jawab pencegahan kekerasan seksual kepada korban, sehingga kegagalan menghindari risiko justru dianggap sebagai kesalahan korban itu sendiri.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa *victim blaming* sering berakar pada kecenderungan masyarakat untuk mencari penyebab kekerasan seksual pada diri korban. Korban ditempatkan sebagai individu yang seharusnya mampu untuk mencegah atau menghindari terjadinya kekerasan seksual melalui pilihan pakaian, penampilan, perilaku, perbuatan, cara bergaul, hingga posisi keberadaan pada situasi tertentu. Akibatnya, perhatian terhadap tindakan pelaku menjadi berkurang dan tanggung jawab atas peristiwa kekerasan seksual secara tidak langsung dialihkan kepada korban. Masih kuat kecenderungan masyarakat untuk mengaitkan penyebab terjadinya kekerasan seksual dengan karakteristik korban, dibandingkan perilaku pelaku yang jelas salah. Pola ini sejalan dengan konsep *rape myth* yang menjelaskan bagaimana keyakinan keliru mengenai kekerasan seksual dapat mendorong masyarakat untuk menyalahkan korban dan mengurangi tanggung jawab pelaku atas tindakan yang dilakukannya.

Korban sebagai Penyebab Kekerasan Seksual

Selain dipandang sebagai pihak yang memicu terjadinya kekerasan seksual, berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban juga kerap dianggap turut bertanggung jawab atas peristiwa yang dialaminya. *Victim Blaming* tidak hanya muncul melalui penilaian terhadap karakteristik korban, tetapi juga melalui penilaian terhadap respons korban sebelum, saat, dan setelah mengalami kekerasan seksual (Afredo et al., 2023; Shopiani et al., 2021; Valia & Nuqul, 2025). Dari pandangan ini, korban dianggap seharusnya bisa mencegah, menghindari, atau menghentikan tindakan kekerasan seksual terjadi. Karena hal ini, perhatian masyarakat bergeser dari yang seharusnya berfokus pada tindakan pelaku sebagai penyebab utama terjadinya kekerasan seksual menjadi keputusan dan tindakan yang dialami korban.

Salah satu bentuk yang paling sering ditemukan adalah pertanyaan mengenai alasan mengapa korban tidak melakukan perlawanan ketika mengalami kekerasan seksual. Korban sering dianggap pasif dan tidak cukup berusaha dalam melindungi dirinya sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki ekspektasi bahwa korban akan berteriak, melawan secara fisik, melarikan diri, segera memonta pertolongan ketika menghadapi ancaman kekerasan seksual (Afredo et al., 2023; Valia & Nuqul, 2025; Wahyuni et al., 2022). Ketika ekspektasi respon tersebut tidak dilakukan oleh korban, sebagian masyarakat akan menunjukkan kecenderungan meragukan pengalaman korban atau menganggap bahwa peristiwa yang telah terjadi tidak sepenuhnya merupakan tindakan pemaksaan.

Korban juga sering disalahkan karena dianggap terlambat dalam melaporkan kejadian yang dialaminya. Dalam berbagai kasus, keterlambatan pelaporan justru dijadikan alasan untuk

mempertanyakan kebenaran pengalaman korban. Padahal berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual pada umumnya mengalami tekanan psikologis yang sangat mungkin untuk memengaruhi kemampuan mereka untuk segera melaporkan peristiwa yang dialami. Ada perasaan malu, trauma, takut akan reaksi lingkungan sosial menjadi faktor yang sering menyebabkan diamnya korban dalam jangka waktu tertentu (Kayuan & Pratama, 2022; Putri, 2025; Valia & Nuqul, 2025). Meski demikian, kondisi ini kerap diabaikan sehingga keterlambatan pelaporan justru dipandang sebagai indikasi bahwa korban turut bertanggung jawab atas situasi yang dialaminya. Penafsiran semacam ini mengabaikan fakta bahwa respons korban terhadap peristiwa traumatis sangat beragam. Tidak semua korban mampu memberikan perlawanan secara langsung, dan tidak sedikit korban yang mengalami kebingungan, ketakutan, atau kondisi psikologis tertentu yang memengaruhi cara mereka merespons situasi kekerasan seksual.

Bentuk *victim blaming* lainnya muncul saat masyarakat menilai bahwa korban memberikan kesempatan kepada pelaku melalui interaksi yang dilakukan sebelumnya. Kedekatan antara korban dengan pelaku, hubungan pertemanan, hubungan romansa, maupun komunikasi yang terjadi sebelum terjadinya kekerasan seksual sering kali digunakan sebagai dasar untuk mengurangi tanggung jawab pelaku. Dalam situasi tersebut, korban dianggap telah memahami risiko yang mungkin saja terjadi sehingga sebagian tanggung jawab atas kekerasan seksual secara tidak langsung dibebankan kepada korban kepadanya (Afredo et al., 2023; Azizah et al., 2025; Shopiani et al., 2021). Pandangan ini tentu menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengaitkan persetujuan terhadap suatu hubungan sosial dengan persetujuan terhadap aktivitas seksual meskipun keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan standar perilaku tertentu yang harus dipenuhi oleh korban agar dapat diakui sebagai korban yang “ideal”. Ketika korban tidak menunjukkan respons yang sesuai dengan ekspektasi “ideal” tersebut, muncul kecenderungan untuk mempertanyakan kejujuran korban dan memberikan sebagian tanggung jawab kepada dirinya. Akibatnya, fokus terhadap tindakan pelaku menjadi berkurang dan korban kembali berada dalam posisi yang harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar mengalami kekerasan seksual. Anggapan bahwa korban seharusnya melawan atau segera melapor juga dapat dipahami melalui konsep *rape myth* yang membentuk ekspektasi tertentu mengenai bagaimana korban kekerasan seksual seharusnya bertindak.

Faktor yang Melatarbelakangi Victim Blaming

Budaya Patriarki dan Stereotip Gender

Budaya patriarki dan stereotip gender adalah faktor yang paling dominan melatarbelakangi munculnya *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih terpengaruh oleh sistem nilai patriarkial yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan daripada perempuan. Sistem nilai ini yang kemudian membentuk berbagai stereotip gender yang mengatur bagaimana individu, baik perempuan maupun laki-laki seharusnya berperilaku dalam kehidupan sosial (Azizah et al., 2025; Shopiani et al., 2021; Valia & Nuqul, 2025; Wahyuni et al., 2022).

Dalam budaya patriarki, perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga moralitas, kesopanan, dan kehormatan. Ketika terjadi kekerasan seksual, perhatian masyarakat lebih banyak diarahkan pada korban, terutama jika korban adalah perempuan. Perempuan lebih banyak dipertanyakan daripada pelaku yang dalam beberapa kondisi justru lebih mudah dimaklumi atau dianggap wajar. Konstruksi sosial ini kemudian melahirkan berbagai stereotip gender dimana perempuan dianggap harus mampu menjaga diri dari ancaman kekerasan seksual, sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan dorongan seksual yang memang lebih sulit untuk dikendalikan (Dewi et al., 2026; Wahyuni et al., 2022).

Stereotip gender juga melahirkan gambaran sosok korban “ideal” bagi masyarakat. Legitimasi status korban akan lebih mudah didapatkan bila korban adalah sosok perempuan yang baik, sopan, dan memenuhi standar “ideal” yang ada. Saat korban tidak mencapai standar tersebut, korban akan dihadapi dengan kergauan, penghakiman, hingga tuduhan dari masyarakat.

Dampak Victim Blaming terhadap Korban

Dampak Psikologis

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa victim blaming memberikan dampak psikologis yang signifikan terhadap korban kekerasan seksual. Beban psikologis didapat bukan hanya dari peristiwa yang ditimpanya, melainkan sekaligus respons sosial yang diterimanya setelah peristiwa kekerasan seksual terjadi. Korban harus berhadapan dengan berbagai bentuk penghakiman, stigma, dan penilaian negatif dari lingkungan sosial (Azizah et al., 2025; Putri, 2025; Shopiani et al., 2021).

Selain memunculkan tekanan emosional, victim blaming juga dapat menimbulkan perasaan bersalah pada korban. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korban yang secara berkelanjutan menerima tuduhan atau pertanyaan yang menyudutkan, berpotensi menyerap penilaian negatif tersebut. Korban mulai mempertanyakan kembali tindakan yang telah dilakukannya sebelum kejadian berlangsung dan mulai mempercayai dirinya turut bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya (Putri, 2025; Shopiani et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa victim blaming dapat mendorong korban untuk menyalahkan dirinya sendiri (*self-blame*), meskipun tanggung jawab atas kekerasan seksual sepenuhnya ada pada pelaku.

Dampak psikologis victim blaming juga berkaitan dengan munculnya gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Korban kekerasan seksual rentan mengalami trauma berkepanjangan, kecemasan, depresi, gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*), hingga perasaan putus asa yang berkepanjangan (Ramadhani & Nurwati, 2023; Shopiani et al., 2021). Tekanan psikologis yang terus menerus dialami korban dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, serta kemampuan korban untuk menjalani kehidupan secara normal setelah peristiwa kekerasan seksual terjadi.

Lebih jauh, victim blaming dapat menyebabkan korban kehilangan rasa aman terhadap lingkungan sosialnya. Korban yang sebelumnya berharap memperoleh dukungan justru menerima keraguan, penghakiman, atau bahkan tuduhan dari orang-orang di sekitarnya menyebabkan timbulnya

perasaan terisolasi dan membuat korban enggan menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada orang lain. Akibatnya, korban kehilangan akses terhadap dukungan sosial yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan pascakekerasan seksual (Azizah et al., 2025; Harahap & Safiq, 2026).

Dengan demikian, victim blaming dapat dipandang sebagai faktor yang memperpanjang penderitaan korban dan menghambat proses pemulihan psikologis pascakekerasan seksual.

Hambatan Pelaporan dan Pencarian Bantuan

Hasil telaah berbagai penelitian menunjukkan bahwa victim blaming menjadi salah satu faktor yang menghambat korban kekerasan seksual untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Ketika korban menyaksikan atau mengalami sendiri berbagai bentuk penghakiman sosial terhadap korban kekerasan seksual, muncul kekhawatiran bahwa pengalaman serupa akan diterima apabila mereka mengungkapkan kejadian yang dialami. Akibatnya, banyak korban memilih untuk diam, menyembunyikan pengalaman tersebut, atau menunda pelaporan karena takut menerima respons negatif dari lingkungan sekitarnya (Shopiani et al., 2021; Valia & Nuqul, 2025; Wahyuni et al., 2022).

Salah satu hambatan yang paling sering ditemukan adalah ketakutan korban dengan respons tidak dipercaya. Korban khawatir akan dianggap terlalu berlebihan, berbohong, atau salah menafsirkan tindakan pelaku. Situasi ini menyebabkan korban merasa bahwa proses pelaporan justru berpotensi menambah beban yang harus mereka hadapi (Harahap & Safiq, 2026; Putri, 2025; Wahyudi, 2024; Wahyuni et al., 2022).

Kekhawatiran terhadap stigma tersebut membuat korban memilih untuk menyimpan pengalaman yang dialami daripada harus menghadapi kemungkinan penghakiman dari lingkungan sosial. Dalam beberapa kasus bahkan korban memilih memutus komunikasi dengan lingkungan sekitar karena merasa tidak akan memperoleh dukungan yang dibutuhkan. Kondisi ini menyebabkan korban kehilangan kesempatan untuk memperoleh perlindungan, pendampingan psikologis, maupun bantuan hukum yang dapat mendukung proses pemulihan pascakekerasan seksual (Kayuan & Pratama, 2022; Valia & Nuqul, 2025).

Lebih jauh, rendahnya pelaporan akibat victim blaming tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga berpengaruh terhadap upaya penanganan kekerasan seksual secara lebih luas. Ketika korban memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya, pelaku berpotensi terhindar dari proses hukum dan tetap memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan serupa kepada korban lainnya. Artinya, victim blaming tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berkontribusi terhadap berlanjutnya siklus kekerasan seksual dalam masyarakat.

Victim Blaming sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder

Sistem Peradilan Pidana

Victim Blaming terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan sosial masyarakat, tapi juga terjadi dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Beberapa penelitian menemukan bahwa korban sering mendapat pertanyaan,

penilaian, perlakuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengarahkan kesalahan kepada dirinya selama proses pelaporan, penyelidikan, hingga persidangan berlangsung (Kayuan & Pratama, 2022; Liantha Adam Nasution et al., 2023; Syahbur et al., 2024; Valia & Nuqul, 2025). Kondisi ini menunjukkan korban juga harus menghadapi respons institusional yang berpotensi memperburuk penderitaan yang telah dialami sebelumnya.

Sama seperti sebelumnya, bentuk *victim blaming* yang paling sering ditemukan berputar pada kecenderungan untuk mempertanyakan perilaku korban sebelum terjadinya kekerasan seksual, alasan berada di lokasi tertentu, hubungannya dengan pelaku, cara berpakaian, maupun alasan tidak melakukan perlawanan secara fisik. Meskipun pertanyaan tersebut dapat menjadi bagian dari proses pemeriksaan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa fokus pertanyaan yang berlebihan terhadap perilaku korban berpotensi menciptakan kesan bahwa korban turut disalahkan atas kekerasan seksual yang dialaminya (Kayuan & Pratama, 2022; Syahbur et al., 2024; Valia & Nuqul, 2025).

Dampak dari *victim blaming* dalam sistem peradilan pidana bukan hanya dirasakan secara psikologis, melainkan memengaruhi keberlanjutan proses hukum. Korban yang merasa tidak dipercaya dan diperlakukan tidak adil akan berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum. Beberapa korban memilih menghentikan proses pelaporan, menolak untuk melanjutkan pemeriksaan, atau enggan untuk mencari bantuan hukum lebih lanjut karena pengalaman negatif yang diterimanya selama berinteraksi dengan sistem peradilan (Liantha Adam Nasution et al., 2023; Syahbur et al., 2024).

Berdasarkan hal tersebut, *victim blaming* dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu bentuk viktimisasi sekunder yang dialami korban kekerasan seksual. Korban justru berisiko mengalami pengalaman yang memperkuat trauma dan rasa tidak aman, alih-alih memperoleh perlindungan dan dukungan. Oleh karena itu, *victim-centered approach* diperlukan agar sistem peradilan tidak menjadi ruang yang melanggengkan praktik *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual.

Media dan Ruang Digital

Perkembangan media digital dan media sosial membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk dapat mengakses, membahas, sekaligus memberikan opini terhadap berbagai kasus kekerasan seksual. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ruang digital juga menjadi salah satu tempat praktik *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual berkembang. Korban tidak hanya menghadapi penilaian negatif lingkungan sekitar, melainkan masyarakatnya lebih luas melalui media sosial (Firmanda et al., 2023; Putri, 2025; Sundari, 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengguna media sosial kerap mempertanyakan cara berpakaian korban, aktivitas korban sebelum kejadian, hubungan korban dengan pelaku, hingga alasan korban mengungkapkan kasus yang dialaminya kepada publik. Dalam banyak kasus, perhatian publik justru lebih banyak tertuju pada perilaku korban. Akibatnya, korban kembali berada dalam posisi yang harus mempertanggungjawabkan pengalaman yang dialaminya di hadapan publik (Firmanda et al., 2023; Putri, 2025).

Selain komentar masyarakat, victim blaming juga dapat muncul melalui cara media memberitakan kasus kekerasan seksual. Pemberitaan yang terlalu menonjolkan identitas, latar belakang, atau kehidupan pribadi korban berpotensi memperkuat stigma terhadap korban. Dalam beberapa situasi tertentu, media bisa secara tidak langsung membangun narasi yang mengarahkan publik untuk mempertanyakan keputusan serta perilaku korban sebelum terjadinya kekerasan seksual. Akibatnya, fokus pemberitaan bergeser dari tindakan pelaku menuju evaluasi terhadap korban (Putri, 2025).

Fenomena tersebut secara lebih jelas terlihat pada kasus kekerasan seksual berbasis digital, termasuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau revenge porn. Penelitian menunjukkan bahwa korban sering menerima penghakiman berlapis. Selain menjadi korban penyebaran konten pribadi, korban juga dihadapkan dengan tuduhan bahwa dirinya bertanggung jawab atas tersebarnya konten tersebut karena lalai, tidak berhati-hati, atau dianggap secara sukarela membuat konten yang kemudian disalahgunakan oleh pelaku (Sundari, 2023).

Di satu sisi, media dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong dukungan terhadap korban. Namun, di sisi lain, media dan ruang digital juga dapat menjadi ruang berkembangnya victim blaming yang memperkuat stigma terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan pemberitaan yang lebih menggunakan sudut pandang korban, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar ruang publik tidak menjadi tempat yang memperpanjang penderitaan korban melalui berbagai bentuk penghakiman dan penyalahan korban.

KESIMPULAN

Victim Blaming terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi fenomena yang sering terjadi. Praktik ini umumnya muncul dalam bentuk anggapan bahwa korban berperan menjadi penyebab atau gagal mencegah terjadinya kekerasan seksual. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa budaya patriarki, stereotip gender, dan mitos tentang kekerasan seksual berkontribusi terhadap munculnya praktik victim blaming. Selain berdampak pada psikologis dan menghambat proses pelaporan, victim blaming juga dapat memunculkan viktimisasi sekunder dalam peradilan maupun ruang digital. Oleh karenanya perlu peningkatan kesadaran pada masyarakat dan penguatan perspektif korban saat melihat suatu kasus kekerasan seksual untuk mengurangi victim blaming.

REFERENSI

- Afredo, A., Khoerunnisa, A. R., Fitriani, A., & Astuti, N. F. (2023). Persepsi Mahasiswa Tangerang Mengenai Victim Blaming Dalam Pelecehan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *1*(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Azizah, S. N., Alia, M. N., & Mujayapura, M. R. R. (2025). FENOMENA VICTIM BLAMING DALAM KASUS PELECEHAN: KEBIASAAN BURUK YANG TERUS DINORMALISASI. *1. Ilmu Pengetahuan Sosial*, *12*(6), 2361–2368. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025>

- Dewi, S. K., Secilia, T. I., & Sinaga, W. F. (2026). Victim Blaming in Society the Case of Sexual Violence Against Women in Banjarmasin. *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta*, 13(1), 40–45. <http://nursingjournal.respati.ac.id/index.php/JKRY/index>
- Firmanda, H., Azlina, I. I. S., & Septipah, I. (2023). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum. *Reformasi Hukum*, 27(1), 38–49. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.489>
- Harahap, T. A. A., & Safiq, A. (2026). Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Seksual : Telaah Viktimologi dan Perlindungan Korban. *Journal If Contemporary Research*, 03(01), 261–276. <https://ziaresearch.or.id/index.php/fatih>
- Kayuan, P. C. K., & Pratama, I. P. A. (2022). BLAMING THE VICTIM PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *Jurnal Raad Kertha*, 5(2), 42–53. <https://doi.org/10.47532/jirk.v5i2.685>
- Komnas Perempuan. (2026). *Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan 2025*. 1.
- Liantha Adam Nasution, Fahmi, Z., Efendi, S., Rozali, A., Muklis, M., & Muhammad Asim Rafiq. (2023). The Persistence of Victim Blaming in Child Rape Trials: A Victimological Analysis of the Banjarmasin High Court Acquittal. *Nusantara : Journal of Law Studies*, 2(NO.2), 1–8. <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.18662151>
- Putri, L. R. T. (2025). MENYALAHKAN KORBAN DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL: PERSPEKTIF HUKUM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(4), 1413–1431. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.8033>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share : Social Work Journal*, 12(2), 131–137. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Shopiani, B. S., Wilodati, & Supriadi, U. (2021). Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 940–955. <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/36089>
- Sundari, M. T. (2023). Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship dan Balas Dendam (Revenge Porn). *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 3–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Syahbur, D. F., Martha, A. E., & Rizqia, G. P. (2024). Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding. *CONTEMPORARY ISSUES IN CRIMINAL LAW*, 1(1), 19–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art2>
- Valia, V., & Nuqul, F. L. (2025). Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi Tentang Victim-Blaming pada Polisi. *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 4(2), 332–338. <https://doi.org/10.71088/jpfi.v4i2.67>
- Wahyudi, A. A. (2024). MENINJAU EFEKTIVITAS KERANGKA HUKUM DALAM

MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA.

JURNAL ILMIAH MULTIDISPLIN ILMU, 1(5), 60–67.

<https://doi.org/https://doi.org/10.69714/mkjdxn66>

Wahyuni, S., Nurbayani, S., Kesumaningsih, I., & Hargono, D. (2022). Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(1), 1–17.
<https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.1>